

Kapasitas Kelembagaan Dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kota Surakarta

Johan Bhimo Sukoco

Program Studi Administrasi Perkantoran, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro, Indonesia

Email: johanbhimo@live.undip.ac.id

Abstract: *Micro, Small, and Medium Scale Enterprises (SMEs) building is often due to the weak institutional capacity. Limited capital ownership, poor business knowledge, and narrow business network make SME performers less powerful in improving their business. This research studied the SMEs building in Surakarta City, viewed from indicator of empowerment according to Mardikanto (2013), Institutional Building. This research employed a descriptive qualitative method. Data collection was carried out using interview, observation, and document analysis. Technique of analyzing data used was purposive sampling, data validation was carried out using method triangulation, and data analysis was conducted using an interactive model of analysis. The result of research showed that institutional capacity of SMEs in Surakarta City was still weak. SMEs performers (actors) still understood poorly the procedure and requirement of business licensing. This made them dealing with business licensing reluctantly, leading to the weak business institution.*

Abstraksi: Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seringkali dikarenakan lemahnya kapasitas kelembagaan. Kepemilikan modal yang minim, pengetahuan usaha yang rendah, serta kurang luasnya jejaring usaha membuat pelaku UMKM menjadi kurang berdaya dalam meningkatkan usahanya. Penelitian ini mengkaji pembinaan UMKM di Kota Surakarta dilihat dari indikator pemberdayaan menurut Mardikanto (2010), yaitu Bina Kelembagaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling, validitas data menggunakan triangulasi metode, dan analisis data menggunakan analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan kapasitas kelembagaan UMKM di Kota Surakarta masih lemah. Pelaku UMKM masih kurang memahami prosedur dan persyaratan perizinan usaha. Hal ini mengakibatkan pelaku UMKM enggan melakukan pengurusan perizinan usaha yang berakibat lemahnya kelembagaan usaha.

Keywords: *institution, SMEs, capacity; kelembagaan, UMKM, kapasitas*

Pendahuluan

Kemandirian masyarakat secara ekonomi dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kewirausahaan melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah UMKM di Indonesia mengalami peningkatan sejak tahun 2013 sampai 2015 sebesar 17,2 persen. Pada tahun 2013 jumlah usaha mikro sebesar 2.887.015 unit, kemudian pada tahun 2014 meningkat sebesar 3.220.563 unit, dan terus meningkat pada tahun 2015 sebesar 3.385.851 unit.

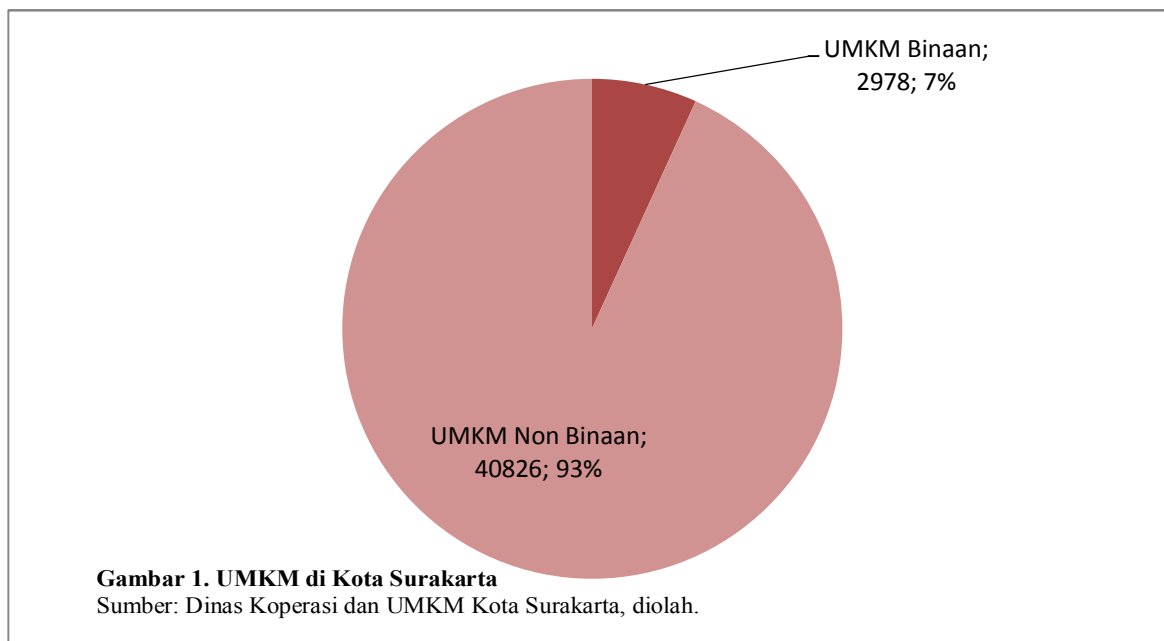
Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini menarik dikaji. Kecepatan dalam bertumbuh kembang ini menjadi potensi unggulan yang menjadi karakteristik

UMKM. Hal ini senada dengan pernyataan Reijnders dan Verstappen (Rahab, 2009) yang menyebutkan bahwa UMKM memiliki keunggulan dalam pemasaran berupa kecepatan bereaksi, fleksibilitas dan kemampuan melihat peluang pasar.

Kuantitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tinggi ini sayangnya tidak diikuti dengan pembinaan yang baik oleh pemerintah. Kota Surakarta yang dipilih dalam riset ini memiliki jumlah UMKM yang cukup besar pula, yaitu sebanyak 43.804 unit. Kuantitas ini terdiri dari 41.512 usaha berskala mikro, 2.197 usaha berskala kecil, dan 95 usaha berskala menengah. Ironisnya, dari kuantitas yang cukup besar ini, hanya sebanyak 2.978 usaha saja yang sudah menjadi UMKM Binaan pemerintah

setempat. Jadi, masih ada sekitar 40.826 UMKM yang belum tersentuh pendampingan pemerintah. Berikut ini untuk lebih memahami kondisi di lokasi penelitian dapat dilihat dalam Gambar 1.

Menengah. Kebanyakan ritel modern memberikan persyaratan berupa ijin produk dimana hal ini seringkali sulit dipenuhi oleh pelaku UMKM. Kebanyakan pelaku UMKM belum memiliki ijin usaha maupun ijin produk, sehingga produknya tidak dapat



Gambar 1 tersebut menunjukkan masih terdapat 93 persen UMKM di Kota Surakarta yang belum mendapatkan pendampingan dari pemerintah. Kondisi ini menjadi indikasi bahwa pemerintah belum serius dalam melakukan pembinaan UMKM di Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta perlu menyadari potensi UMKM ini, mengingat penyerapan tenaga kerja dari UMKM Binaan cukup besar. Data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surakarta Tahun 2017, menunjukkan terdapat sekitar 13.217 tenaga kerja yang terserap melalui UMKM Binaan. Kuantitas ini terdiri dari 7.213 tenaga kerja berjenis kelamin laki-laki dan 6.004 tenaga kerja berjenis kelamin perempuan.

Kajian yang dilakukan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surakarta, menunjukkan UMKM di Kota Surakarta masih terkendala masalah pemasaran. Hal tersebut dikarenakan masih banyak, ritel-ritel modern yang belum bersedia menerima produk-produk Usaha Mikro, Kecil dan

diterima oleh ritel modern.

Permasalahan lainnya yang dihadapi dalam pengembangan UMKM selama ini ialah pembinaan yang dilakukan pemerintah belum menerapkan prinsip keberlanjutan. Pelatihan bagi pelaku UMKM seringkali hanya berhenti saat program berakhir. Pembinaan UMKM belum menerapkan prinsip *Sustainable Development* (pembangunan keberlanjutan). Hal ini berlawanan dengan prinsip pemberdayaan yang dikemukakan Subedjo dan Supriyanto (Mardikanto dan Soebianto, 2015) bahwa pemberdayaan sangat memiliki keterkaitan dengan *Sustainable Development*, dimana pemberdayaan ibarat sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju keberlanjutan ekonomi, sosial, dan ekologi yang dinamis.

Beranjak dari berbagai permasalahan ini, maka penulis tertarik untuk mengkaji kapasitas kelembagaan dalam pembinaan UMKM di Kota Surakarta. Penelitian-penelitian lain terkait UMKM sudah banyak

diteliti oleh penelitian lain (Greenbank, 2001; Devins, *et.al*, 2005; Hidayat, 2013; dan Daroin, 2014). Keempat peneliti ini telah mengkaji mengenai pengembangan UMKM dari berbagai aspek. Namun demikian, belum banyak penelitian yang mengkaji mengenai aspek kelembagaan secara spesifik. Penelitian ini mengkaji pembinaan UMKM menggunakan indikator pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto (2010), yaitu Bina Kelembagaan. Bina Kelembagaan ini meliputi ketersediaan modal dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, pengembangan jejaring usaha, serta perizinan usaha pelaku UMKM. Bina Kelembagaan ini digunakan peneliti dalam menggambarkan pembinaan UMKM di Kota Surakarta.

Tinjauan Pustaka

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah didefinisikan dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Lebih lanjut, Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan.

Di sisi lain, Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Fajar (2016), menyebut bahwa terdapat dua alasan yang menjadikan UMKM perlu mendapatkan perlindungan dari pemerintah, yaitu: Pertama, besarnya jumlah pengusaha UMKM di Indonesia yang cukup banyak. Hasil pengukuran dan analisis ekonomi tahun 2007 bahkan menunjukkan sebanyak 637 unit usaha mikro dan kecil mengalami kenaikan omzet, sehingga berpindah kategorinya menjadi usaha menengah. Kedua, adanya berbagai kelemahan atau kekurangan UMKM ketika masuk dalam sistem persaingan pasar bebas. Sistem pasar bebas justru menjadi ancaman dari keberlanjutan UMKM, karena pemerintah kurang memberikan proteksi terhadap masuknya produk-produk dari program internasionalisasi UMKM negara-negara maju. Padahal dari sisi kualitas tidak jauh berbeda. Oleh karena itu, UMKM perlu mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

Penelitian-penelitian bertopik UMKM banyak diteliti oleh penelitian lain (Greenbank, 2001; Devins, *et. al*, 2005; Hidayat, 2013; dan Daroin, 2014). Greenbank (2001) melalui penelitiannya mengkaji penetapan tujuan dalam usaha mikro, menunjukkan bahwa pelaku UMKM memiliki kecenderungan yang minim dalam meningkatkan keuntungan dan mengejar laba. Lebih lanjut, Devins, *et. al.* (2005) melalui penelitiannya mengkaji model konseptual manajemen usaha mikro melalui implikasi penelitian dan kebijakan. Hasil kajiannya menunjukkan pendekatan intervensi dalam hubungan antara manajer mikro dan agen intervensi sangat penting dalam keberhasilan perancangan usaha.

Hidayat (2013) mengkaji pembinaan UMKM di Kota Surakarta melalui analisis peran dinas. Riset ini menemukan fakta bahwa pemerintah telah melakukan pembinaan bagi pelaku UMKM dengan optimal melalui program peningkatan kapasitas, permodalan dan fasilitas. Daroin (2014) melalui risetnya mengkaji pengembangan UMKM di Kabupaten Bojonegoro, dimana temuan penelitiannya menunjukkan strategi yang paling strategis dalam pengembangan UMKM yaitu inovasi, pameran, dan pemasaran online.

Beberapa penelitian ini bermanfaat dalam menambah referensi bagi penulis dalam memahami permasalahan dalam pembinaan UMKM. Namun demikian, belum banyak penelitian yang mengkaji mengenai aspek kelembagaan secara spesifik. Penelitian ini mengkaji pembinaan UMKM menggunakan indikator pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto (2010), yaitu Bina Kelembagaan. Kelembagaan sosial atau organisasi sosial yang tersedia dan dapat berjalan efektif akan dapat mendukung terselenggaranya Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan. Suatu bentuk relasi sosial dapat disebut sebagai sebuah kelembagaan jika, memenuhi 4 (Empat) komponen yaitu: (1) Komponen Personal; (2) Komponen Kepentingan; (3) Komponen Aturan; (4) Komponen Struktur.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Travers (Sevilla, et al., 1993), menuliskan metode deskriptif ini digunakan dalam menggambarkan sifat keadaan yang berjalan pada saat penelitian dilakukan, dan memeriksa sebab-sebab dari gejala tertentu. Di sisi lain, Slamet (2006), menuliskan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan memberikan uraian mengenai gejala sosial yang diteliti, dengan mendiskripsikan gejala tersebut berdasarkan pada indikator-indikator yang dijadikan dasar ada tidaknya suatu gejala yang diteliti. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan memaparkan pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Surakarta dilihat dari kapasitas kelembagaannya.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Teknik pengumpulan data menggunakan *purposive sampling*. Sugiyono (2009), menuliskan bahwa *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, seperti kompetensi informan. Informan kunci atau *key informan* dalam penelitian ini, yaitu: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surakarta, dan pengelola UMKM.

Teknik validitas data menggunakan triangulasi metode. Pada penelitian ini, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara antara *key informan* dan membandingkan antara hasil observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Sutopo (2002) menuliskan bahwa data yang sama atau sejenis akan lebih teruji kebenarannya apabila dikaji dari beberapa sumber data dan metode yang berbeda. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif menurut Milles & Huberman (Sutopo, 2002), yang dilakukan dengan memperhatikan 3 (tiga) komponen utama, meliputi: Reduksi Data, Sajian Data, dan Penarikan kesimpulan serta verifikasinya

Pembahasan dan Hasil

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Surakarta masih menemui kendala dalam peningkatan kapasitas kelembagaan. Hal ini terlihat dari pemodalannya usaha, ketersediaan tenaga kerja, dan perizinan usaha. Permodalan yang dimiliki pelaku UMKM masih terbatas. Selain itu, permasalahan terkait minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas menjadi problem yang serius dalam pengembangan UMKM. Di sisi lain, masih banyak UMKM yang belum memiliki izin usaha, sehingga lemah dalam pemasaran ke ritel-ritel modern yang mempersyaratkan perijinan produk/usaha. Berikut ini penjelasan dari masing-masing permasalahan tersebut:

Pemodaan Usaha

Permodalan menjadi permasalahan mendasar dalam pembinaan UMKM di Kota Surakarta. Padahal, pemerintah telah menganggarkan bantuan permodalan melalui Kementerian Koperasi dan UMKM. Hasil penelitian menunjukka, pada tahun 2002 sampai dengan 2006 lalu bahkan pemerintah setempat sudah terlihat sangat antusias dalam menggelontorkan bantuan permodalan untuk UMKM. Tahun 2002, misalnya, pemerintah

memberikan dana modal sejumlah Rp 200.000.000,-, kemudian secara fluktuasi terdapat kenaikan nominal hingga tahun 2006 sebanyak Rp 950.000.000,-.

Kuantitas penerima modal juga cenderung mengalami peningkatan yang signifikan, dimana tahun 2002 sebanyak 40 unit UMKM penerima bantuan modal, hingga meningkat secara fluktuasi pada tahun 2006 sebanyak 151 UMKM yang memperoleh bantuan permodalan. Hal ini seperti terlihat dalam Tabel 1 yang menunjukkan bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta untuk pembinaan UMKM.

Tabel 1. Bantuan APBD untuk Pembinaan UMKM di Kota Surakarta

Tahun	Dana	Kuantitas UMKM Penerima Bantuan Modal
(1)	(2)	(3)
2002	300.000.000	40
2003	390.000.000	52
2004	413.691.000	60
2006	950.000.000	151
2007	300.000.000	79
2008	450.000.000	91

Sumber: Data Primer dan Sekunder

Namun, data dari Tabel 1 tersebut menunjukkan penurunan nominal bantuan dari tahun 2006 hingga tahun 2008 lalu. Pada tahun 2006 bantuan yang digelontorkan sebesar Rp 950.000.000,-, kemudian menurun drastis pada tahun 2007 sejumlah Rp 300.000.000,-, dan pada tahun 2008 naik lagi namun tidak mencapai setengah dari nominal tahun 2006 sejumlah Rp 450.000.000,-. Hal ini indikasi pemerintah kurang serius melakukan pembinaan UMKM. Pemerintah belum secara konsisten memberikan bantuan dana untuk permodalan sebagai pondasi dasar dalam peningkatan kapasitas kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Problem berikutnya ialah ketersediaan tenaga kerja. Untuk mengkaji hal ini, maka penulis mengkaitkannya dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di instansi yang menaungi persoalan UMKM di Kota Surakarta, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM. Institusi ini diperkuat oleh 39 personel. Hal ini menjadi peluang bagi pemerintah dalam melakukan pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Berikut ini dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Kuantitas Pegawai di Dinas Koperasi & UMKM Kota Surakarta

No.	Satuan Kerja	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.	Kepala Dinas	1
2.	Kepala Bagian Tata Usaha	1
3.	Kepala Sub Bagian	3
4.	Kepala Sub Dinas	3
5.	Kepala Seksi	6
6.	Staff Sub Bag. Tata Usaha	8
7.	Staff SubBag. Bina Program	4
8.	Staff Sub Dinas Bina Kelembagaan, Koperasi dan UMKM	6
9.	Staff Sub. Dinas Usaha dan Permodalan	7
Total		39

Sumber: Data Sekunder

Ketersediaan SDM dalam peningkatan kapasitas kelembagaan UMKM di Kota Surakarta ini bukan hanya dilihat dari memadainya kuantitas pegawai di lingkungan unit kerja yang menangani permasalahan UMKM. Lebih dari itu, penelitian ini mengkaji pula mengenai ketersediaan SDM dalam hal tenaga kerja yang bekerja pada UMKM bersangkutan. Hasil penelitian menunjukkan pelaku UMKM di Kota Surakarta cenderung menggunakan tenaga kerja dari internal keluarga dibandingkan dengan menggunakan tenaga kerja profesional dari luar keluarga.

Hal ini seperti yang dikatakan B07 sebagai pemilik usaha Jamu Puteri Solo, yang memberikan pernyataan bahwa usaha yang dirintisnya merupakan usaha turun temurun keluarga besar. Berlandaskan hal ini, ia meyakini bahwa usaha yang dirintisnya hanya boleh mempekerjakan pekerja dari lingkungan keluarga besar. Hal ini dilakukan guna untuk menjalin kerukunan antar keluarga dan menjaga kekompakan keluarga. Berikut ini pernyataan B07: “Proses pembuatan jamu saya hanya berjumlah lima orang dan itu sudah termasuk saya sendiri dikarenakan usaha yang kami jalani merupakan warisan turun temurun, maka yang boleh mengolah usaha ini bahkan pekerjanya tidak boleh selain anggota keluarga.”

Hasil penelitian menunjukkan tidak semua pemilik UMKM lebih nyaman menggunakan tenaga kerja dari lingkungan internal keluarga. Beberapa UMKM lain lebih memilih menggunakan tenaga kerja dengan memberdayakan masyarakat di lingkungan sekitar usaha. Hal ini diperlihatkan B02 selaku pemilik usaha daur ulang limbah koran di Kota Surakarta, yang lebih memilih untuk memberdayakan masyarakat di sekitar usaha khususnya ibu-ibu rumah tangga. Berikut ini pernyataan B02: “Iya, karena dapat dilihat dari tenaga kerja yang memberdayakan tenaga kerja yang berasal dari lingkungan sekitar, khususnya ibu – ibu rumah tangga.”

Pernyataan B02 ini diperkuat oleh B06 selaku pemilik UMKM Tambah Tumbuh, sebuah usaha kerajinan tangan yang berlokasi di Kelurahan Purwosari, Kota Surakarta. B06 bahkan memberdayakan pula narapidana yang masih berada dalam kurungan penjara melalui aktivitas usaha ini. Berikut ini pernyataan B06: “UMKM saya memberdayakan masyarakat sekitar, seperti ibu rumah tangga. Selain ibu rumah tangga saya juga memberdayakan para narapidana yang berada didalam penjara, agar mereka saat mereka dikeluarkan dari penjara mereka tidak melakukan hal yang buruk. Melainkan bisa menambah penghasilan dengan ilmu yang sudah diberikan.”

Jadi, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketersediaan tenaga kerja pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Surakarta diperkuat dengan memberdayakan masyarakat sekitar lokasi usaha. Beberapa pelaku UMKM memilih menggunakan tenaga kerja dengan memberdayakan masyarakat sekitar untuk memperkuat kapasitas kelembagaan usahanya. Namun, di sisi lain, beberapa pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lainnya memilih menggunakan tenaga kerja dari internal keluarganya untuk memperkuat usahanya.

Perizinan usaha

Penguatan kapasitas kelembagaan UMKM dapat dilakukan dengan pengurusan perizinan usaha UMKM. Hal ini sangat penting dikarenakan melalui pengurusan izin usaha tentu akan dapat memperkuat peluang pelaku UMKM dalam mendapatkan berbagai skim bantuan dari pemerintah. Selain itu, UMKM yang sudah memiliki izin usaha maupun izin produk tentu akan lebih mudah dalam memasarkan produknya ke pasar ritel modern.

Hasil penelitian menunjukkan masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang belum melakukan pengurusan izin usaha. Hal ini dikarenakan prosedur perizinan yang belum dipahami dengan baik oleh para pelaku UMKM. Beberapa pelaku UMKM beranggapan bahwa pengurusan izin usaha membutuhkan waktu yang lama dan prosedur yang panjang, sehingga mereka enggan melakukan pengurusan izin usaha maupun izin produk hasil usahanya.

Tabel 3. Data Skala Formal dan Non Formal UMKM di Kota Surakarta

Skala (1)	Jumlah UMKM (2)
Formal	6.075
Non Formal	48.582
Jumlah	54.582

Sumber: Data Sekunder

Padahal, data kuantitas UMKM ini akan dapat terpantau dengan baik jika para pelaku UMKM melakukan pengurusan izin usaha. Selama ini, data yang dikeluarkan oleh dinas terkait berbeda-beda dikarenakan masih banyak UMKM di Kota Surakarta yang belum melakukan perizinan usaha. Beberapa UMKM yang belum melakukan perizinan ini seringkali ada pada skala non formal, dikarenakan usaha skala non formal ini tidak terikat oleh persyaratan perizinan usaha yang terlalu menikat. Padahal, kondisi di lapangan terdapat sekitar 48.582 unit usaha skala non formal di Kota Surakarta, dimana jumlah ini tentu saja lebih rawan diindikasikan belum melakukan izin usaha. Berikut ini data skala formal dan non formal UMKM di Kota Surakarta.

Kesimpulan

Beranjak dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kapasitas kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Surakarta masih lemah, utamanya dalam permodalan. Selain itu, pelaku UMKM masih kurang memahami prosedur dan persyaratan perizinan usaha. Hal ini mengakibatkan pelaku UMKM enggan melakukan pengurusan perizinan usaha yang berakibat lemahnya kelembagaan usaha.

Namun demikian, dari segi ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di institusi yang menangani permasalahan UMKM ini, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM, sangat memadai. Hal ini idealnya menjadi peluang bagi Pemerintah Kota Surakarta dalam melakukan pembinaan UMKM. Di sisi lain, ketersediaan tenaga kerja pada UMKM di Kota Surakarta diperkuat dengan memberdayakan masyarakat sekitar lokasi usaha maupun menggunakan tenaga kerja dari internal keluarganya untuk memperkuat usahanya.

Daftar Referensi

Daroin, Ana Dhaoud. (2015). Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Handycraft Kayu Jati di Dusun Bandar Desa Batokan

Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro. *Thesis*. Surakarta: Program Pascasarjana Magister Pendidikan Ekonomi, Universitas Sebelas Maret.

Devins, David, Jeff Gold, Steve Johnson, and Rick Holden. (2005). A Conceptual Model of Management Learning in Micro Business: Implications for Research and Policy. *Education + Training*, Vol. 47, Issue 8/9, pp. 540-551.

Fajar, Mukti. (2016). *UMKM di Indonesia (Perspektif Hukum Ekonomi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Greenbank, Paul. (2001). Objective Setting in the Micro-Business. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, Vol.7 Issue 3, pp.108-127.

Hidayat, Wahid Anggih. (2013). Pembinaan UMKM Kota Surakarta oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surakarta. *Skripsi*. Surakarta: Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret.

Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Mardikanto, Totok. (2010). *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Surakarta: Fakultas Pertanian UNS dengan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press).

Rahab. (2009). Penerapan Manajemen Merek pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 16 No.1, 18-25.

Sevilla, Consuelo G, Jesus A. Ochave, Twila G. Punsalan, Bella P. Regala, dan Gabriel G. Uriarte. (1993). *Pengantar Metode Penelitian* (Edisi terjemahan Alimuddin Tuwu). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Slamet, Y. (2006). *Metode Penelitian Sosial*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Penerbit ALFABETA.